

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan daerah merupakan instrumen penting dalam memberikan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan daerah harus memenuhi standar yang telah ditetapkan agar dapat mencerminkan kondisi keuangan daerah secara akurat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang digunakan oleh pemerintahan adalah laporan keuangan yang memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana keuangan negara dikelola. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam situasi ini, penyebaran laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan merupakan upaya konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di tingkat pusat dan daerah.

Laporan keuangan pemerintah harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku, termasuk ketepatan dalam penyampaian dan penyusunan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga harus dipatuhi. Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang dihasilkan harus dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya bagi para

pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga legislatif. Setelah disusun, laporan keuangan pemerintah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dipublikasikan kepada masyarakat setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komponen laporan yang diserahkan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Komponen laporan keuangan yang diajukan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Keberadaan laporan-laporan ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang baik mengenai kinerja keuangan pemerintah dan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah laporan keuangan yang tidak memenuhi standar kualitas. Hal ini disebabkan oleh adanya data yang disajikan dalam laporan keuangan yang tidak sesuai atau tidak memadai dengan standar yang berlaku. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan beberapa penyimpangan dalam audit laporan keuangan pemerintah, di mana masih banyak pihak yang menyajikan data yang tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berfungsi sebagai sarana bagi Pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada masyarakat. Setiap tahun, laporan keuangan ini diperiksa dan dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memberikan opini terkait kualitas laporan tersebut. Laporan keuangan pemerintah daerah dianggap berkualitas jika

mendapatkan penilaian berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah telah disusun dan diungkapkan dengan benar dan diungkapkan dengan wajar dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, auditor dapat menyampaikan empat jenis pendapat sebagai berikut: (a) opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (b) opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (c) opini Tidak Wajar, dan (d) Pernyataan Menolak untuk memberikan opini atau tidak memberikan pendapat (Disclaimer). Menurut Bastian (2011:194), terdapat lima kategori pendapat yang diberikan, yaitu: (1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, (2) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Tambahan Penjelasan, (3) Pendapat Wajar Dengan Pengecualian, (4) Pendapat Tidak Wajar, Dan (5) Pernyataan tidak memberikan pendapat. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada semester I tahun 2020 mengungkapkan adanya 10.499 temuan permasalahan. Dari jumlah tersebut, terdapat 5.175 permasalahan terkait sistem pengendalian internal dan 5.324 permasalahan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan total nilai mencapai Rp 1,52 triliun (Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK).

Tabel 1. 1
Opini BPK Terhadap LKPD Kota Pematangsiantar

LKPD Tahun	Opini BPK
2017	WTP
2018	WDP
2019	WDP
2020	WDP
2021	WTP
2022	WTP
2023	WTP

Sumber : BPK RI – Sumut

Data hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar menunjukkan fluktuasi opini selama tujuh tahun terakhir. Berdasarkan tabel 1.1, Kota Pematangsiantar sempat Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018 hingga 2020, terjadi penurunan kualitas pelaporan keuangan dengan diperolehnya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tiga tahun berturut-turut. Opini WDP mengindikasikan bahwa terdapat penyimpangan atau kelemahan material dalam penyajian laporan keuangan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan dengan laporan hasil pemeriksaan BPK yang mencatat banyaknya permasalahan terkait sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2021 hingga 2023, Kota Pematangsiantar kembali berhasil meraih opini WTP selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan yang signifikan, baik

dari sisi penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan akuntabilitas, maupun pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mengelola keuangan daerah.

Berdasarkan berita yang dipublikasikan oleh Topkota.co. pada 26 Juli 2024, Pada tahun anggaran 2023, terdapat dugaan korupsi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPD Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kota Pematangsiantar menemukan indikasi *mark up* harga dalam pengadaan ATK di sejumlah OPD dan delapan kecamatan, yang diduga merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Kasus ini telah menjadi sorotan publik karena menunjukkan lemahnya pengawasan dan potensi penyalahgunaan anggaran di tingkat OPD.

Selain itu berdasarkan berita yang dipublikasikan oleh Pendidikanantikorupsi.org. pada tahun 2023, terjadi kasus korupsi dalam proyek pembangunan jalan dan jembatan dengan gorong-gorong galvanis di Kota Pematangsiantar yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi tahun anggaran 2018 senilai Rp20 miliar. Kasus ini melibatkan mantan Plt Kepala Dinas PUPR dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri sehingga merugikan keuangan negara.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, kualitas laporan keuangan daerah yang mencerminkan pemerintahan yang baik memerlukan perubahan paradigma serta penerapan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah di setiap tahap, mulai dari

penganggaran, implementasi, hingga pertanggungjawaban. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Jika pemerintah daerah dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka mereka akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan mereka. Selain itu, pemerintah daerah perlu memahami sistem akuntansi, khususnya sistem akuntansi keuangan daerah, agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dengan mudah dipahami oleh para pengguna. Pemerintah daerah, sebagai pengelola dana publik, diwajibkan untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat diandalkan, sehingga diperlukan sistem akuntansi yang kuat.

Adapun faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah akuntabilitas. Menurut (Alviano & Ayudiyati, 2024) Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang melibatkan penjelasan dan jawaban atas semua tindakan dan kinerja yang telah dilakukan baik oleh individu, organisasi, maupun pimpinan, kepada pihak yang berhak dan memiliki wewenang untuk meminta informasi mengenai pertanggungjawaban tersebut, baik dari segi teknis maupun administratif. Akuntabilitas merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik, terutama dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Akuntabilitas mencakup penyebaran informasi keuangan kepada masyarakat sehingga publik dapat memahami bagaimana dana digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dan menilai tanggung jawab pemerintah atas semua program

yang dilaksanakan. Laporan keuangan yang akuntabel mencerminkan komitmen pemerintah yang konsisten terhadap standar yang berlaku. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Pratiwi et al., 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kamelia, dkk., 2024) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Bab 1 ketentuan Umum Pasal 1 menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketahanan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal diperlukan untuk memudahkan identifikasi dan analisis terhadap permasalahan yang ada, serta potensi masalah yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan, sehingga hasil pencapaian dapat diketahui dengan jelas. Di antara tantangan yang paling sering dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja administratif adalah korupsi, kesalahan administratif, dan pengelolaan keuangan yang tidak memadai. Proses pengendalian harus terintegrasi dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten oleh pimpinan serta seluruh pegawai. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi adalah dasar dari pengendalian ini,

yang menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah. Banyak mekanisme pengendalian internal yang diterapkan di negara lain telah terbukti mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Peningkatan ini tidak hanya memberikan informasi ekonomi yang lebih jelas dan dapat dipercaya, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang tepat serta membantu meminimalisir korupsi (Agbenyo et al., 2018).

Dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sekaligus pengawas. Laporan keuangan disusun dan dilaporkan dengan benar, tepat waktu, dan sesuai sasaran melalui sistem yang memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan opini audit yang baik. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan. (Triono & Dewi, 2020) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian Dewi et al. (2019) menyatakan bahwa bahwa semakin efektif penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan pemerintah daerah, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat.

Salah satu faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM). Kompetensi SDM sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi karakteristik kualitatif yang diperlukan, sehingga laporan tersebut dapat berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas tidak hanya bergantung pada jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, tetapi juga pada kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut. Dalam hal ini kompetensi SDM memiliki peran yang sangat signifikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan entitas yang bersangkutan. Kompetensi merujuk pada kemampuan individu untuk melaksanakan tugas dengan tepat; tanpa kompetensi yang memadai, kinerja optimal tidak dapat dicapai (Nasirwan et al., 2024). Sumber daya manusia yang tidak memiliki kemampuan yang memadai tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan efisien, efektif, atau ekonomis. Akibatnya, Pekerjaan yang dihasilkan mungkin tidak tepat waktu dan dapat menyebabkan pemborosan waktu dan tenaga. Dengan pengalaman yang baik, waktu yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan dapat dihemat. Hal ini karena pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh sumber daya manusia keuangan memastikan bahwa tugas-tugas ditangani dengan tepat dan laporan diserahkan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Semakin cepat laporan keuangan disajikan, semakin baik pula untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan penelitian (Rahman & Permatasari, 2021) menunjukkan bahwa Kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya masalah serius dalam pengelolaan keuangan daerah, yang berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan. Praktik korupsi yang terungkap mencerminkan lemahnya sistem pengendalian internal di instansi pemerintah daerah, yang seharusnya berfungsi

untuk mencegah penyimpangan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Akibatnya, kualitas laporan keuangan daerah menjadi diragukan, karena laporan yang dihasilkan tidak dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan upaya yang serius dalam memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan akuntabilitas dan membangun integritas di kalangan pegawai pemerintah daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, kualitas laporan keuangan daerah dapat ditingkatkan, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Banyak penelitian terdahulu mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, seperti akuntabilitas, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan transparansi namun hasilnya beragam. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahman, dkk. (2020) menunjukkan bahwa kompetensi sistem sumber daya manusia dan akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, berbeda pada hasil yang diungkapkan oleh Animah, dkk. (2020) yang menyimpulkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam beberapa aspek. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggabungkan tiga variabel penting secara simultan akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM yang dalam penelitian sebelumnya sering dikaji secara terpisah atau dikombinasikan dengan variabel lain seperti transparansi atau sistem akuntansi keuangan. Oleh karena itu,

penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan literatur dari sisi objek dan variabel, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam konteks lokal yang aktual dan relevan bagi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kota Pematangsiantar”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah yaitu terjadi dugaan korupsi dan manipulasi anggaran di beberapa OPD Kota Pematangsiantar, khususnya pada pengadaan ATK dan proyek pembangunan infrastruktur.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan masalah diatas maka penelitian ini akan membatasi masalah yakni hanya untuk melihat apakah Pengaruh Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kota Pematangsiantar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kota Pematangsiantar?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kota Pematangsiantar?
3. Apakah Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kota Pematangsiantar?
4. Apakah Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kota Pematangsiantar?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kota Pematangsiantar.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kota Pematangsiantar.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kota Pematangsiantar.
4. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kota Pematangsiantar.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharap mampu memberikan pengetahuan serta wawasan baru terkait dengan kualitas laporan keuangan daerah, dan diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pematangsiantar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi berupa masukan serta informasi yang bermanfaat berkaitan dengan pentingnya penerapan kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Pematangsiantar.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi wadah untuk memberikan pengetahuan baru serta memperluas wawasan dalam memahami Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada OPD Kota Pematangsiantar.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan untuk penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan daerah atau sebagai perbandingan untuk penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan subjek yang sama.

d. Bagi Universitas

Dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan Universitas Negeri Medan dalam meningkatkan wawasan kepada mahasiswa pada Fakultas Ekonomi khususnya prodi Akuntansi.